



2009, tidak ada SMA/SMK baru

► Siswa Jogja wajib punya tabungan

Oleh Yuspita Anjar Palupi
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Bisa dipas-tikan tahun ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja tidak akan membuka sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK).

Disdik hanya akan mengoptimalkan jumlah peserta didik, dengan membuka dua buah program baru di SMK swasta yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. "Dinas tidak akan membuka SMA dan SMK baru di Jogja," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Kota Jogja, Suyono kepada wartawan akhir pekan lalu.

Dari data yang ada di Dinas Pendidikan saat ini terdapat sebanyak 15.473 siswa SMK negeri dan swasta yang tersebar di 28 SMK negeri dan swasta di Jogja. Sedangkan untuk jumlah siswa SMA tercatat sebanyak 18.159 siswa tersebar di 48 SMA negeri dan swasta.

"Disdik Kota Jogja akan mengoptimalkan sekolah yang sudah ada dan hanya membuka program baru," ujarnya.

Ia menuturkan kebijakan ini adalah tindak lanjut dari kebijakan Depdikans yang menargetkan pada 2015 nanti perbandingan jumlah rasio antara siswa SMA dan SMK adalah 60 : 40.

"Dan saat ini di Kota Jogja jumlah perbandingan siswa SMA dan SMK baru 46 : 54. Ditargetkan pada 2011 di Jogja perbandingan rasio siswanya bisa menjadi 50 berbanding 50," tuturnya.

Dikatakan pada 2009-2010, akan dibuka dua buah program baru di dua buah SMK swasta. Yakni program multimedia di SMK BOPKRI 1 dan program perbankan di SMK Marsudi Luhur 1. "Program perbankan merupakan satu-satunya program sekolah kejuruan yang diselenggarakan oleh SMK di DIY," ujar dia.

Wajib menabung

Terpisah Walikota Jogja, Herry Zudianto mengatakan akan segera meluncurkan program tabungan pendidikan siswa yang wajib dimiliki oleh siswa dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK mulai tahun pelajaran 2009/2010.

"Tabungan pendidikan ini sangat menguntungkan. Selain tidak ada biaya administrasi dan biaya buku tabungan. Siswa justru akan mendapat asuransi. Yang biayanya akan dibayarkan oleh pemerintah," terang dia.

Herry menegaskan, program ini sebagai lanjutan dari dibebaskan biaya operasional sekolah bagi sekolah negeri. Dengan pembebasan tersebut berarti beban orangtua untuk biaya pendidikan menjadi berkurang.

Namun demikian orangtua tetap harus menanggarkan biaya tersebut guna persiapan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi.

"Jika ditabung paling tidak yang tadinya tidak terpikirkan akan melanjutkan hingga perguruan tinggi karena keterbatasan biaya bisa terealisasi," tambah Herry.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Positif | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 08 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005